



Sumber: Kemenkumham.go.id

Judul Skripsi:

KOMUNIKASI STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

(Studi Kasus pada Pengeluaran Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan Pembubaran Ormas HTI)

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi

Nama : Vera Ismudiarti

NIM : 1510411038



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

2019



**KOMUNIKASI STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
(Studi Kasus pada Pengeluaran Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan Pembubaran
Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia)**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial Pada Program Studi Ilmu Komunikasi**

**Vera Ismudiarti
1510411038**

**ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
2019**

Untuk Papah dan Mamah, yang selalu memberikan support dan cintanya...

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Vera Ismudiarti
NRP : 1510411038
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini. Maka, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 24 Januari 2019

takan,

Vera Ismudiarti

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Vera Ismudiarti

NRP : 1510411038

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : **KOMUNIKASI STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI (Studi Kasus pada Pengeluaran Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia)**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Pembimbing Utama

Yani Hendrayani, Ph.D

Pembimbing Pedamping

Ir. Iswahyuni, M.M

KETUA PROGRAM STUDI

Azwar, SS, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal ujian : 17 Januari 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Penulisan ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Public Relations FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang berjudul “KOMUNIKASI STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI (Studi Kasus pada Pengeluaran Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia)”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini peneliti mendapatkan bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada Yani Hendrayani, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi dan Ir. Iswahyuni, M.M selaku Dosen Pembimbing Pedamping. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Dr. Freddy Harris, SH,LL.M.,ACCS, serta individu yang telah bersedia menjadi informan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Terakhir peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang tersayang peneliti.

Jakarta, 7 Januari 2019

Penulis,



Vera Ismudiarti

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vera Ismudiarti
NRP : 1510411038
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

KOMUNIKASI STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

(Studi Kasus pada Pengeluaran Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia)

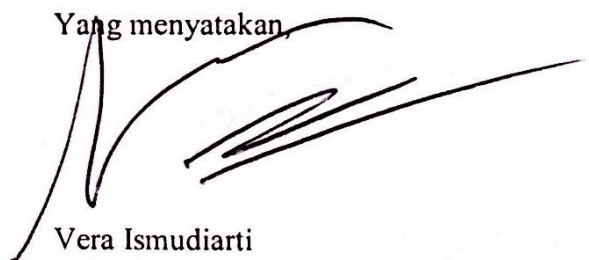
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Januari 2019

Yang menyatakan,



Vera Ismudiarti

KOMUNIKASI STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
(Studi Kasus pada Pengeluaran Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan
Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia)

VERA ISMUDIARTI

ABSTRAK

Dilatarbelakangi oleh keinginan peneliti dalam mengetahui bagaimana proses komunikasi strategis yang dilakukan dalam pengeluaran sebuah putusan kebijakan, penelitian ini membahas tentang bagaimana Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) menjalankan komunikasi strategis dalam pengeluaran putusan kebijakan pencabutan izin dan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil temuan yang didapat adalah mengingat kasus ormas HTI ini termaksud dalam permasalahan bertaraf nasional karena ideologi negara Indonesia yang terancam, dalam pelaksanaan proses komunikasi strategis pada saat pengeluaran putusan kebijakan pencabutan izin dan pembubaran ormas HTI terdapat aktor-aktor yang ikut terlibat, dalam kasus ini tidak hanya Kemenkumham saja tetapi terdapat berbagai lembaga negara lainnya yakni dari lembaga tertinggi negara yaitu Presiden sampai dengan masyarakat. Pada pelaksanaan komunikasi strategis, Koordinasi, pengkajian, dan sinergitas adalah kunci utamanya. Komunikasi strategis yang dilakukan dalam menangani kasus ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mencapai hasil keputusan dan kesepakatan bersama demi melindungi persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Komunika s Strategis, Putusan Kebijakan, Koordinasi, Pengkajian, Sinergitas, Indonesia, Kemenkumham, HTI

**STRATEGIC COMMUNICATION OF THE INDONESIAN MINISTRY OF
LAW AND HUMAN RIGHTS**
*(The Case Study on The Issuance of The Policy Decision on The Revocation of
Licenses and Dissolution of the Hizbut Tahrir Indonesian Community
Organization)*

VERA ISMUDIARTI

ABSTRACT

This research is motivated by the researcher's desire to know how strategic communication process carried out in the issuance of the policy decisions, this study discusses how Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights carry out strategic communication carried out in the issuance of the policy decisions in revocation of licenses and dissolution of the Hizbut Tahrir Indonesian community organization. This research is a qualitative study and uses a case study research method. Data collection techniques used are through in-depth interviews and document. As a result, considering the case of HTI organizations referred to in national issues each because Indonesia's ideology is threatened, in the implementation of strategic communication process carried out in the issuance of the policy decisions in revocation of licenses and dissolution there are actors involved, in this case it is not just Ministry of Law and Human Rights but there are various other state institutions, namely from the highest state institutions, namely the President to the community. In the implementation of strategic communication, coordination, assessment and synergy are the main keys. Strategic communication carried out in handling this case has the main objective, to achieve the results of a joint decision and agreement to protect the unity and unity of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Strategic Communication, Policy Decisions, Coordination, Assessment, Synergy, Indonesia, Kemenkumham, HTI*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Signifikansi Penelitian	1
1.2. Fokus Penelitian	7
1.3. Pertanyaan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Konsep-Konsep Penelitian	13
2.2.1 Komunikasi Strategis	13
2.2.2 Peran Humas Pemerintah	15
2.2.3 Putusan Kebijakan Publik	19
2.2.4 Perppu Nomor 2 Tahun 2017	20
2.2.5 Hizbut Tahrir Indonesia	21
2.3 Kerangka Pemikiran	25
 BAB III METODE PENELITIAN	 26
3.1 Metode Penelitian	26
3.2 Metode Pengumpulan Data	26
3.3 Penentuan Informan	29
3.4 Teknik Analisis Data	30
3.5 Teknik Keabsahan Data	31

3.6 Waktu dan Lokasi Penelitian	31
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	33
4.1.1 Profil Kementerian Hukum dan HAM RI	33
4.1.2 Sejarah Singkat Kementerian Hukum dan HAM RI	34
4.1.3 Logo Kementerian Hukum dan HAM RI	36
4.1.4 Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI	38
4.1.5 Struktur Organisasi	38
4.2. Profil Informan	47
4.3. Hasil Penelitian	49
4.3.1 Komunikasi Strategis dalam Pengeluaran Sebuah Putusan Kebijakan Pemerintah	49
4.3.2 Latar Belakang dari Pengeluaran Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan Pembubaran Ormas HTI	51
4.3.3 Komunikasi Strategis Kemenkumham dalam Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan Pembubaran Ormas HTI	64
4.3.4 Peran Humas dalam Komunikasi Strategis Pada Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan Pembubaran Ormas HTI	66
4.4. Pembahasan	70
4.4.1 Pembahasan mengenai mengapa Kemenkumham melakukan komunikasi strategis untuk putusan kebijakan pencabutan izin dan pembubaran ormas HTI	70
4.4.2 Analisis Proses Komunikasi Strategis yang Dilakukan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Pengeluaran Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan Pembubaran Ormas HTI	73
4.4.3 Analisis Peran Humas dalam Komunikasi Strategis Pada Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan Pembubaran Ormas HTI	87
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Portal berita online putusan kebijakan pemerintah pada PT. Freeport	2
Gambar 2	Portal berita online mengenai Putusan Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba	3
Gambar 3	Portal berita online mengenai Disahkannya UU Tax Amnesty	3
Gambar 4	Portal berita online mengenai Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan Pembubaran Ormas HTI	4
Gambar 5	Gedung Kementerian Hukum dan HAM RI	33
Gambar 6	Lambang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	36
Gambar 7	Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI	38
Gambar 8	Dilarangnya Hizbut Tahrir di Berbagai Negara	52
Gambar 9	Dilarangnya Hizbut Tahrir di Berbagai Negara	52
Gambar 10	Dilarangnya Hizbut Tahrir di Berbagai Negara	53
Gambar 11	Siaran Pers yang diterbitkan Kemenkumham mengenai putusan kebijakan pencabutan izin dan pembubaran ormas HTI	55
Gambar 12	Portal Berita Online CNN Indoensia mengenai Sepak Terjang dan Akhir Hikayat Hizbut Tahrir Indonesia	58
Gambar 13	Menkopolhukam beserta para pimpinan lembaga negara	65
Gambar 14	<i>Statement</i> dari Presiden RI terkait putusan kebijakan pada ormas HTI	77
Gambar 15	<i>Statement</i> dari Dirjen AHU terkait putusan kebijakan pada ormas HTI	78
Gambar 16	<i>Statement</i> dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai permbubaran ormas HTI	78
Gambar 17	<i>Statement</i> dari Menteri Agama terkait putusan kebijakan pada ormas HTI	78
Gambar 18	Konferensi pers yang dilakukan Kemenkumham terkait pengambilan putusan kebijakan pencabutan izin dan pembubaran ormas HTI	84
Gambar 19	Konferensi pers yang dilakukan Kemenkopolhukam beserta lembaga negara yang terkait mengenai pengambilan putusan kebijakan pencabutan izin dan pembubaran ormas HTI	85
Gambar 20	Bagan Komunikasi Strategis yang terjadi pada Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan Pembubaran Ormas HTI	85

Gambar 21	Artikel berita perkembangan Kemenkumham VS HTI di pengadilan.....	91
-----------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.	<i>Timeline</i> Waktu Pengerjaan Skripsi	31
Tabel 3.	Profil Informan.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Surat Riset dari Universitas.....	A1
Surat Balasan Riset Kementerian Hukum dan HAM RI....	A2
Lampiran B Transkrip Wawancara	B1
Lampiran C Daftar Riwayat Hidup	C1
Lampiran D Dokumen Penelitian	D1
Lampiran E Sertifikat.....	E1